

# ANALISIS PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RESTI ELKA NUGRAHWATI  
Pan Budi Marwoto  
Hendarti Tri Setyo Mulyani

*Accounting Program*  
STIE-IBEK Bangka Belitung  
Pangkalpinang, Indonesia  
[e-jurnal@stie-ibek.ac.id](mailto:e-jurnal@stie-ibek.ac.id)

**Abstract**-The purpose of writing this thesis is to find out regional taxes that have comparative advantage and prove the influence of vehicle tax, cost of vehicle and vehicle fuel tax toward locally-generated revenue in the Province of Bangka Belitung Island. The research was using Location Quotient Analysis (LQ) and multiple linier regression. The result of Location Quotient Analysis (LQ) is vehicle tax, cost of vehicle and vehicle fuel tax have comparative advantage compared to other regional taxes. The result of regression equation is locally-generated revenue =  $-159641,3 + 3,142893 \text{ vehicle tax} + 0,7176234 \text{ cost of vehicle} + 0,7030886 \text{ vehicle fuel tax}$ . The result of simultaneous hypothesis test (F-test) showed that vehicle tax, cost of vehicle and vehicle fuel tax have positive influence toward locally-generated revenue with a probability level 0,044918. The result of partial hypothesis test (t-test) showed that vehicle tax, cost of vehicle and vehicle fuel tax have no influence toward locally-generated revenue. However, vehicle tax, cost of vehicle and vehicle fuel tax have a tendency to increase locally-generated revenue if seen from a positive value in the regression equation. The value of determination coefficients test ( $R^2$ ) is 0,998462. That value can be explained that vehicle tax, cost of vehicle and vehicle fuel tax have power about 99,8462% to explain the locally-generated revenue while the remaining 0,1538% are explain by other factors. The result of multicollinearity is there is no multicollinearity between the independent variables.

**Keywords:** Vehicle Tax, Cost of Vehicle, Vehicle Fuel Tax and Locally-Generated Revenue

## I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah suatu negara hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 Ayat 1 (satu) dan 2 (dua), menyatakan bahwa NKRI terbagi atas beberapa provinsi.

Kemudian provinsi itu dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan dan rumah tangga pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2000 juga diberikan kewenangan dalam mengelola daerah yang utuh dan bulat. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Dana pembangunan yang digunakan pemerintah daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Komponen PAD yang paling memberikan kontribusi besar adalah pajak daerah, seperti yang terlihat pada tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Komponen Penerimaan PAD (Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD
2014	508.262	9.357	1.205	44.282
2015	506.940	11.329	5.243	48.289
2016	507.983	8.651	5.613	52.662
2017	629.136	5.434	5.306	69.736
2018	787.235	7.605	5.114	49.951
<b>Jumlah</b>	<b>2.939.558</b>	<b>42.378</b>	<b>22.483</b>	<b>264.923</b>

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019)

Pajak daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus bertambah, seperti yang terlihat pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Tahun	Jumlah Penduduk
2014	1.343.881
2015	1.372.813
2016	1.401.827
2017	1.430.865
2018	1.459.873

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019)

Bertambahnya jumlah penduduk telah menunjukkan pertumbuhan yang tinggi terhadap pengguna kendaraan bermotor. Pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan mobilitas setiap individu meningkat sehingga jumlah wajib pajak kendaraan bermotor juga meningkat, seperti yang terlihat pada tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
2014	752.443
2015	786.270
2016	819.909
2017	872.568
2018	913.196

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019)

meningkatnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga meningkat yang memberikan keuntungan dalam penerimaan PKB, BBNKB dan PBBKB. Oleh karena itu, PKB, BBNKB dan PBBKB berpotensi memiliki keunggulan komparatif.

Pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif inilah yang sangat diharapkan untuk meningkatkan PAD, karena PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan potensi daerah agar pendanaan terpenuhi. Sehingga perhatian dan fokus akan pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif harus terus dikembangkan dan ditingkatkan, serta kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pajak daerah tersebut juga harus terus progresif tapi tanpa merugikan masyarakat. Kebijakan-kebijakan perpajakan yang progresif tentu memerlukan prioritas pengembangannya agar kebijakan perpajakan tersebut tidak salah sasaran.

Kebijakan yang salah sasaran akan cenderung mengakibatkan kerugian daerah yang besar karena peningkatan PAD yang terhambat. Penerimaan PAD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga masih ada yang belum mencapai target, seperti yang terlihat pada tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4**  
**Penerimaan PAD (Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Bagian Pendapatan Asli Daerah		Persentase (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2014	556.742	563.108	101,14
2015	558.971	571.802	102,30
2016	581.397	574.911	98,88
2017	738.192	709.614	96,13
2018	789.629	849.906	107,63

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2019)

PAD sebagai sumber pendanaan yang peningkatannya terhambat akan mengakibatkan pembiayaan pembangunan daerah secara keseluruhan juga terhambat. Pembangunan daerah yang terhambat cenderung mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap suatu daerah. Sehingga penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terancam terkena dampak negatif tersebut.

Persoalannya kemudian, belum ada penelitian dari kampus STIE-IBEK Pangkalpinang yang bisa menghasilkan kebijakan perpajakan berdasarkan pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan saran kebijakan perpajakan yang tepat sasaran untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Sehingga kesalahan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan yang salah sasaran tidak akan terjadi.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif.
2. Mengetahui pengaruh PKB terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Mengetahui pengaruh BBNKB terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Mengetahui pengaruh PBBKB terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## II. LANDASAN TEORI

### Perpajakan

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani (dalam Herry Purwono, 2010), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

### Pajak Daerah

Menurut Siahaan (dalam Mourin M. Mosal, 2013), Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Jenis pajak daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009):

1. Pajak provinsi  
Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
2. Pajak kabupaten / kota  
Pajak kabupaten / kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

**Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Tarif pajak kendaraan bermotor (PERGUB Nomor 49 Tahun 2017):

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor orang pribadi.
- b. 2% (dua persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor badan.
- c. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
- d. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah.
- e. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya digunakan untuk mengangkut orang sakit (ambulance), mobil jenazah dan mobil kebakaran, maka pengenaan terhadap PKB diberikan keringanan sebanyak 50% (lima puluh persen).

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor:

1. Nilai jual
2. Bobot

Cara perhitungan pajak kendaraan bermotor:

$PKB = \text{tarif} \times \text{dasar pengenaan pajak}$
--

**Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor (PERGUB Nomor 49 Tahun 2017):

- a. 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk penyerahan pertama.
- b. 1% (satu persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya termasuk hibah dan waris.

- c. 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB untuk penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari lelang pemerintah/*dump*, TNI dan polri yang belum pernah melakukan pembayaran penyerahan pertama bea balik nama kendaraan bermotor.
- d. 1% (satu persen) dari NJKB untuk penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari lelang pemerintah/*dump*, TNI dan polri yang telah melakukan pembayaran penyerahan pertama bea balik nama kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- a. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan pertama alat-alat berat dan alat-alat besar.
- b. 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk penyerahan kedua dan seterusnya untuk penyerahan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang menurut bentuk dan sifatnya digunakan untuk mengangkut orang sakit (ambulance), mobil jenazah dan mobil kebakaran. Maka pengenaan terhadap bea balik nama kendaraan bermotor diberikan keringanan sebanyak 50% (lima puluh persen). Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan:

1. Harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor
2. Harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.

Cara perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor:

$BBNKB = \text{tarif} \times \text{dasar pengenaan pajak}$
--

**Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PERGUB Nomor 49 Tahun 2017):

1. Besarnya tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
2. Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan pemerintah, maka tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor diatas menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor:

1. Nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Cara perhitungan pajak kendaraan bermotor:

$PBBKB = \text{tarif} \times \text{dasar pengenaan pajak}$
--

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 (dalam Achmad, Ariesy, Nidya dan Lisnawati, 2018) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sumber pendapatan asli daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004):

PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

**Teori Keunggulan Komparatif**

David Ricardo dalam bukunya *On The Principles of Economy and Taxation* (1817) mengatakan bahwa setiap negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional, baik memiliki maupun tidak memiliki keunggulan absolutnya sendiri. Artinya, suatu negara apabila berdagang dengan negara lain sekalipun tidak memiliki keunggulan absolut masih dapat memperoleh keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif berdasarkan pada perbandingan biaya yang dikeluarkan suatu negara dalam memproduksi suatu barang dibandingkan dengan negara lain. Sehingga negara dengan biaya rendah akan mengimpor dan negara dengan biaya yang tinggi mengekspor barang tersebut.

Teori keunggulan komparatif dalam penelitian ini menunjukkan potensi pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan teori keunggulan komparatif David Ricardo, pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif adalah pajak daerah yang biaya pemungutan pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajaknya. Sehingga pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif lebih menguntungkan untuk ditingkatkan potensinya oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Kerangka Pikir**

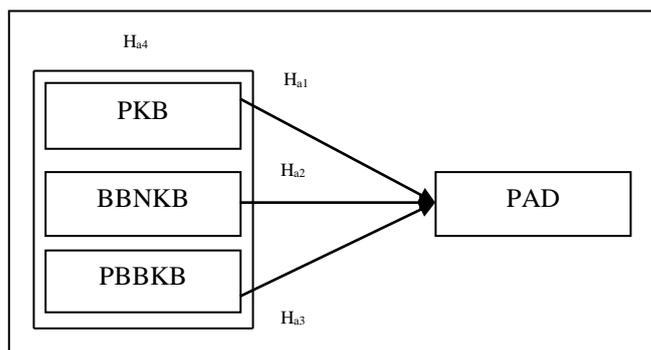
PKB, BBNKB dan PBBKB merupakan pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Pajak daerah

tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PKB, BBNKB dan PBBKB memiliki keselarasan hubungan dengan PAD. Pajak daerah menjadi komponen PAD yang memberikan penerimaan yang besar dan PKB, BBNKB, PBBKB berpotensi menjadi pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif tentu memberikan penerimaan yang besar untuk pajak daerah itu sendiri.

Semakin meningkatnya PKB, BBNKB dan PBBKB maka PAD juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan PKB, BBNKB dan PBBKB memiliki pengaruh positif terhadap PAD, artinya peningkatan PKB, BBNKB dan PBBKB akan menyebabkan PAD mengalami peningkatan.

Penjabaran di atas menunjukkan PKB, BBNKB dan PBBKB berpengaruh terhadap PAD. Pengaruh yang ditunjukkan PKB, BBNKB dan PBBKB adalah pengaruh positif sehingga peningkatannya akan meningkatkan PAD. PKB, BBNKB dan PBBKB dalam penelitian ini diduga berpengaruh terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan kerangka berikut:

**Gambar 1**  
**Kerangka Pikir**



Sumber: Diolah oleh penulis (2019)

**Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat disusun beberapa jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan masih akan dibuktikan secara empiris yaitu sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama  
H<sub>a1</sub> = Diduga terdapat pengaruh PKB terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Hipotesis Kedua  
H<sub>a2</sub> = Diduga terdapat pengaruh BBNKB terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Hipotesis Ketiga  
H<sub>a3</sub> = Diduga terdapat pengaruh PBBKB terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**III. METODOLOGI PENELITIAN**

**Waktu dan Tempat Penelitian**

Data penelitian diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 sampai

dengan tahun 2018. Pelaksanaan penelitian mulai dari pengajuan judul, pengumpulan data, proses data, menganalisis data sampai didapat kesimpulan hasil penelitian berlangsung dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019.

### Variabel yang Diteliti

#### 1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Variabel-variabel yang digunakan:

- Pajak daerah pada tahun-tahun yang dibandingkan
- Jumlah pajak daerah pada tahun-tahun yang dibandingkan

#### 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel-variabel yang digunakan:

##### a. Variabel bebas (*independent variable*)

Variabel bebas atau *independent variable* merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Biasanya dinotasikan dengan simbol X. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor ( $X_1$ ), bea balik nama kendaraan bermotor ( $X_2$ ) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ( $X_3$ ).

##### b. Variabel terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat atau *dependent variable* merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Y).

### Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah diolah. Data sekunder dapat berupa publikasi data yang telah dikumpulkan oleh pihak atau instansi lainnya dengan cara mempelajari beberapa sumber buku atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

Data sekunder yang digunakan untuk keperluan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian. Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini berupa data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Data sekunder tersebut dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

### Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penulis mengolah data menggunakan bantuan *Ms. Excel* dan *Software Program NCSS*, yang terdiri atas analisis kuantitatif, yaitu mengolah data yang sudah tersedia (berbentuk angka) sebagai suatu pedoman dalam menarik suatu kesimpulan.

#### 1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Teori *Location Quotient* digunakan untuk menganalisis dan menentukan keragaman basis ekonomi (potensi pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Analisis tersebut dapat mengidentifikasi pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat dikembangkan untuk dioptimalisasi. Sehingga yang

dikatakan potensial dapat dijadikan prioritas utama dalam perencanaan pembangunan perekonomian. Formula yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{X_{.j}/X_{..}}$$

Keterangan:

$LQ_{ij}$  : Indeks *quotient* lokasi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan pajak rokok.

$X_{ij}$  : Nilai tiap tahun tiap pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan pajak rokok.

$X_i$  : Nilai seluruh tahun tiap pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan pajak rokok.

$X_{.j}$  : Nilai tiap tahun seluruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan pajak rokok.

$X_{..}$  : Nilai total pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan

Nilai yang ditunjukkan LQ ini memiliki arti sebagai berikut:

- Jika nilai  $LQ > 1$ , maka pajak daerah yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif lebih tinggi dari rata-rata. Dengan kata lain bahwa pajak-pajak tersebut lebih terspesialisasi dibandingkan dengan pajak daerah yang lain.
- Jika nilai  $LQ = 1$ , maka pajak daerah yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif sama dengan rata-rata semua pajak daerah.
- Jika nilai  $LQ < 1$ , maka pajak daerah yang bersangkutan tidak memiliki keunggulan yang komparatif. Dengan kata lain bahwa pajak-pajak tersebut kurang terspesialisasi dibandingkan pajak daerah yang lain.

#### 2. Uji kelayakan

##### a. Uji F statistik

Uji F atau uji simultan adalah uji semua variabel bebas secara keseluruhan dan bersamaan di dalam suatu model. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusannya menggunakan statistik uji F yang dapat dilihat dari *Output Analysis of Variance Section* di NCSS. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

- b. Koefisien determinasi ( $R^2$ )  
Koefisien Determinasi menyatakan proporsi keragaman pada variabel bergantung yang mampu dijelaskan oleh variabel penduganya. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1, nilai  $R^2$  yang semakin mendekati 1 menunjukkan pengaruh variabel penduga terhadap variabel bergantung yang semakin kuat. Sebaliknya, semakin mendekati 0 menunjukkan pengaruh yang semakin lemah.
- c. Uji Multikolinieritas  
Multikolinieritas adalah kondisi dimana peubah-peubah bebas memiliki korelasi diantara satu dengan yang lainnya. Sedangkan uji multikolinearitas adalah uji untuk melihat apakah terdapat korelasi antara peubah bebas yang digunakan dalam model regresi. Masalah multikolinieritas baru menjadi masalah jika derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi diantara seluruh variabel secara serentak (Susanti dalam Melnia, 2015).
- d. Analisis Regresi Linier Berganda  
Analisis Regresi Berganda digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \dots$$

Keterangan:

- Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- a : Nilai konstanta
- $b_1, b_2, b_3$  : Koefisien regresi atau kecondongan garis regresi terhadap sumbu X
- $X_1$  : Pajak kendaraan bermotor
- $X_2$  : Bea balik nama kendaraan bermotor
- $X_3$  : Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

3. Pengujian hipotesis

- a. Uji t statistik  
Uji signifikansi secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel independen sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Hal ini perlu dilakukan karena tiap-tiap variabel independen memberi pengaruh yang berbeda dalam model. Statistik uji yang digunakan adalah uji t yang dapat dilihat dari *Output Regression Equation Section* di NCSS. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka terima  $H_a$  atau variabel independen ada pengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka tolak  $H_a$  atau variabel independen tidak ada pengaruh terhadap variabel dependen.

IV. PEMBAHASAN

Analisis Keunggulan Komparatif Potensi Pajak Daerah

Hasil perhitungan dengan menggunakan Ms. Excel diperoleh hasil analisis keunggulan komparatif atau *Location Quotient* pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Pajak daerah tersebut yaitu PKB, BBNKB, PBBKB, PPPAP, dan PR. Tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 5  
Hasil Analisis Keunggulan Komparatif Pajak Daerah

Tahun	PKB	BBNKB	PBBKB	PPPAP	PR
2014	1,03	1,06	1,02	0,72	0,75
2015	1,09	0,84	1,03	0,87	1,03
2016	1,09	0,85	0,95	1,02	1,27
2017	1,01	1,04	0,92	1,09	1,10
2018	0,85	1,13	1,07	1,17	0,89
Rataan	1,02	1,00	1,00	0,98	1,01

Sumber: Diolah oleh penulis (2019)

Pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif adalah potensi pajak daerah yang memiliki rata-rata nilai  $LQ = 1$  dan rata-rata nilai  $LQ > 1$  sekaligus memberikan pemasukan setiap bulannya. Potensi-potensi pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif (rata-rata nilai  $LQ = 1$ , rata-rata nilai  $LQ > 1$ ) dan memberikan pemasukan setiap bulannya adalah PKB, BBNKB dan PBBKB. PKB memiliki nilai  $LQ > 1$  yaitu 1,02 dan memberikan pemasukan setiap bulannya. BBNKB memiliki nilai  $LQ = 1$  yaitu 1,00 dan memberikan pemasukan setiap bulannya. Serta PBBKB memiliki nilai  $LQ = 1$  yaitu 1,00 dan memberikan pemasukan setiap bulannya.

Pengelompokkan Nilai LQ Potensi Pajak Daerah

Besaran nilai LQ potensi pajak daerah yang diperoleh ada yang cenderung meningkat dan fluktuatif sepanjang tahun analisis. Sehingga diperlukan pengelompokkan terhadap nilai LQ tersebut berdasarkan rata-rata nilai LQ dan penerimaan yang ada setiap bulan. Kelompok pertama adalah kelompok potensi pajak daerah yang memiliki rata-rata nilai  $LQ = 1$  dan rata-rata nilai  $LQ > 1$ . Serta memberikan pemasukan setiap bulan diisi oleh PKB, BBNKB dan PBBKB.

Kelompok kedua adalah kelompok potensi pajak daerah yang memiliki rata-rata nilai  $LQ > 1$  tetapi tidak memberikan pemasukan setiap bulannya diisi oleh PR. Ketiga adalah kelompok potensi pajak daerah yang memiliki rata-rata nilai  $LQ < 1$  diisi oleh PPPAP. Selanjutnya, pengelompokkan potensi pajak daerah berdasarkan rata-rata nilai LQ dan penerimaan yang ada setiap bulan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6  
Pengelompokkan Potensi Pajak Daerah Berdasarkan Rataan Nilai LQ dan Penerimaan Setiap Bulan

No	Jenis Pajak	Rataan Nilai LQ dan Penerimaan Setiap Bulan	Potensi Pajak Daerah
----	-------------	---	----------------------

1.	Pertama	Rataan nilai LQ > 1 dan rataan nilai LQ = 1 sekaligus memberikan pemasukan setiap bulannya.	1. PKB 2. BBNKB 3. PBBKB
2.	Kedua	Rataan nilai LQ > 1 tetapi tidak memberikan pemasukan setiap bulannya.	Pajak Rokok
3.	Ketiga	Rataan nilai LQ < 1	PPPAP

Sumber: Data hasil olahan (2019)

Berdasarkan tabel 6 di atas kelompok pertama diisi oleh pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif, serta pajak daerah yang selalu memberikan penerimaan setiap bulannya. Kelompok pertama merupakan kelompok pajak daerah yang potensial sehingga harus dikembangkan untuk dioptimalisasi.

Kelompok kedua diisi oleh pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif tetapi tidak memberikan penerimaan setiap bulannya. Kelompok ketiga diisi oleh pajak daerah yang tidak memiliki keunggulan komparatif. Kelompok ketiga merupakan kelompok pajak daerah yang tidak potensial dilihat dari nilai LQ < 1.

Berdasarkan penjelasan di atas, dipilih pajak daerah kelompok pertama yaitu PKB, BBNKB dan PBBKB. PKB, BBNKB dan PBBKB akan diteliti lebih dalam pengaruhnya terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Harapannya agar dapat memberikan saran pajak daerah yang harus dikembangkan untuk dioptimalisasi.

**Kelayakan Model Penelitian**

**Tabel 7**  
**Hasil Analisis Pengaruh PKB, BBNKB, dan PBBKB Secara Simultan terhadap PAD**

<i>Dependent Variable: PAD</i>			
<i>Independent Variable</i>	<i>Regression Coefficient</i>	<i>Prob. Level</i>	<i>Decision (5%)</i>
<i>Intercept</i>	-159641,3	0,258216	
PKB	3,142893	0,102329	<i>Accept Ho</i>
BBNKB	0,7176234	0,281553	<i>Accept Ho</i>
PBBKB	0,7030886	0,284096	<i>Accept Ho</i>
<i>R-Squared</i>	0,998462		
	<i>F-Ratio</i>	<i>Prob. Level</i>	
	216,4204	0,044918	
<b><i>Multicollinerity is NOT a problem</i></b>			

Sumber: Diolah oleh penulis (2019)

Tabel 7 menunjukkan uji kelayakan secara statistik dimana *Prob. Level* uji F sebesar 0,044918, R<sup>2</sup> sebesar

0,998462 dan untuk multikolinearitas *is NOT a problem*. Sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan dan menghasilkan kesimpulan yang diakui dalam statistik. Berdasarkan tabel hasil olahan data di atas, maka dapat dibuat suatu model persamaan regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$PAD = -159641,3 + 3,142893 PKB + 0,7176234 BBNKB + 0,7030886 PBBKB$$

Berdasarkan hasil analisis uji F pada tabel 7 di atas dapat dilihat nilai *Prob. Level* sebesar 0,044918 < 0,05, sehingga jelas bahwa secara simultan PKB, BBNKB dan PBBKB berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 7 di atas dapat dilihat nilai koefisien determinasi (*R-Squared*) adalah 0,998462. Nilai ini dapat didefinisikan bahwa 99,8462% PAD dapat dijelaskan oleh variabel PKB, BBNKB, dan PBBKB. Sedangkan untuk sisanya sebesar 0,1538% (100% - 99,8462%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Selain dari pada itu, berdasarkan hasil analisis pada tabel 7 di atas dalam penelitian ini dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Dimana hal ini dapat dilihat dari tabel 7 yang menyebutkan *Multicollinerity is NOT a problem* dan dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel-variabel bebas di dalam penelitian ini. Salah satu syarat layak atau tidaknya suatu model persamaan regresi adalah variabel bebas harus bebas tidak ada hubungan di antara variabel-variabel bebasnya.

Adapun interpretasi dari model persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut: Nilai PKB sebesar 3,142893 memiliki arti bahwa PKB mempunyai hubungan yang positif dan searah. Artinya apabila variabel PKB meningkat Rp 1 maka PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan meningkat sebesar Rp 3,142893. Nilai BBNKB sebesar 0,7176234 memiliki arti BBNKB memiliki hubungan yang positif dan searah. Artinya apabila variabel BBNKB meningkat Rp 1 maka PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan meningkat sebesar Rp 0,7176234. Sedangkan nilai PBBKB sebesar 0,7030886 memiliki arti PBBKB memiliki hubungan yang positif dan searah. Artinya apabila variabel PBBKB meningkat Rp 1 maka PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan meningkat sebesar Rp 0,7030886.

**Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah**

**Tabel 8**  
**Hasil Analisis Pengaruh PKB terhadap PAD**

<i>Dependent Variable: PAD</i>			
<i>Independent Variable</i>	<i>Regression Coefficient</i>	<i>Prob. Level</i>	<i>Decision (5%)</i>
<i>Intercept</i>	-159641,3	0,258216	
PKB	3,142893	0,102329	<i>Accept Ho</i>

Sumber : Diolah oleh penulis (2019)

Uji t untuk hasil analisis secara statistik menunjukkan bahwa PKB tidak berpengaruh terhadap PAD. Ditandai dengan nilai probabilitas > 0,05. Seperti yang terlihat pada tabel 8 dapat diketahui nilai *Prob. Level* untuk PKB adalah

sebesar 0,102329, nilai signifikansi sebesar  $0,102329 > 0,05$  sehingga jelas  $H_{a1}$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sangat jelas tidak terdapat pengaruh antara PKB terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil analisis uji t variabel PKB secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD. Ketidakterpengaruhannya tersebut karena PKB merupakan bagian kecil dari pajak daerah secara keseluruhan dan PKB juga merupakan bagian kecil dari PAD. Hubungan bertingkat tersebut menyebabkan PKB memiliki kontribusi yang kecil terhadap PAD sehingga tidak memengaruhi PAD secara keseluruhan. Lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9

Kontribusi PKB terhadap PAD (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Penerimaan PKB (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2014	162.036	563.108	28,78
2015	172.235	571.802	30,12
2016	171.879	574.911	29,90
2017	197.962	709.614	27,90
2018	208.756	849.906	24,56
<b>Rataan</b>	<b>182.574</b>	<b>653.868</b>	<b>28,25</b>

Sumber: Data hasil olahan (2019)

Berdasarkan tabel 9 di atas kontribusi PKB terhadap PAD sangat kecil dengan rata-rata kontribusi hanya 28,25% dari 100%. Sehingga PKB tidak memengaruhi PAD secara keseluruhan. Dilihat dari rata-rata PKB sebesar Rp 182.574.091.669,20 dan rata-rata PAD sebesar Rp 653.868.851.918,76, ini juga merupakan salah satu alasan PKB tidak berpengaruh terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun demikian terdapat kecenderungan bahwa setiap peningkatan pajak daerah yaitu PKB akan diikuti dengan kenaikan PAD jika dilihat dari nilai PKB yang positif dan searah.

**Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Tabel 10

Hasil Analisis Pengaruh BBNKB terhadap PAD

<i>Dependent Variable: PAD</i>			
<i>Independent Variable</i>	<i>Regression Coefficient</i>	<i>Prob. Level</i>	<i>Decision (5%)</i>
<i>Intercept</i>	-159641,3	0,258216	
BBNKB	0,7176234	0,281553	<b>Accept Ho</b>

Sumber : Diolah oleh penulis (2019)

Uji t untuk hasil analisis secara statistik menunjukkan bahwa BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD. Ditandai dengan nilai probabilitas  $> 0,05$ . Seperti yang terlihat pada tabel 10 dapat diketahui nilai *Prob. Level* untuk BBNKB adalah sebesar 0,281553, nilai signifikansi sebesar 0,281553  $> 0,05$  sehingga jelas  $H_{a2}$  ditolak. Hal ini menunjukkan

bahwa sangat jelas tidak terdapat pengaruh antara BBNKB terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil analisis uji t variabel BBNKB secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD. Ketidakterpengaruhannya tersebut karena BBNKB merupakan bagian kecil dari pajak daerah secara keseluruhan dan BBNKB juga merupakan bagian kecil dari PAD. Hubungan bertingkat tersebut menyebabkan BBNKB memiliki kontribusi yang kecil terhadap PAD sehingga tidak memengaruhi PAD secara keseluruhan. Lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 11

Kontribusi BBNKB terhadap PAD (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Penerimaan BBNKB (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2014	139.175	563.108	24,72
2015	110.239	571.802	19,28
2016	111.656	574.911	19,42
2017	169.320	709.614	23,86
2018	230.410	849.906	27,11
<b>Rataan</b>	<b>152.160</b>	<b>653.868</b>	<b>22,88</b>

Sumber: Data hasil olahan (2019)

Berdasarkan tabel 11 di atas kontribusi BBNKB terhadap PAD sangat kecil dengan rata-rata kontribusi hanya 22,88% dari 100%. Sehingga BBNKB tidak memengaruhi PAD secara keseluruhan. Dilihat dari rata-rata BBNKB sebesar Rp 152.160.337.381,40 dan rata-rata PAD sebesar Rp 653.868.851.918,76, ini juga merupakan salah satu alasan BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun demikian terdapat kecenderungan bahwa setiap peningkatan pajak daerah yaitu BBNKB akan diikuti dengan kenaikan PAD jika dilihat dari nilai BBNKB yang positif dan searah.

**Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Tabel 12

Hasil Analisis Pengaruh PBBKB terhadap PAD

<i>Dependent Variable: PAD</i>			
<i>Independent Variable</i>	<i>Regression Coefficient</i>	<i>Prob. Level</i>	<i>Decision (5%)</i>
<i>Intercept</i>	-159641,3	0,258216	
PBBKB	0,7030886	0,284096	<b>Accept Ho</b>

Sumber : Diolah oleh penulis (2019)

Uji t untuk hasil analisis secara statistik menunjukkan bahwa PBBKB tidak berpengaruh terhadap PAD. Ditandai dengan nilai probabilitas  $> 0,05$ . Seperti yang terlihat pada tabel 12 dapat diketahui nilai *Prob. Level* untuk PBBKB adalah sebesar 0,284096, nilai signifikansi sebesar 0,284096  $> 0,05$  sehingga jelas  $H_{a3}$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sangat jelas tidak terdapat pengaruh antara PBBKB terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hasil analisis uji t variabel PBBKB secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD. Ketidakterpengaruhan tersebut karena PBBKB merupakan bagian kecil dari pajak daerah secara keseluruhan dan PBBKB juga merupakan bagian kecil dari PAD. Hubungan bertingkat tersebut menyebabkan PBBKB memiliki kontribusi yang kecil terhadap PAD sehingga tidak memengaruhi PAD secara keseluruhan. Lebih jelasnya dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 13**  
**Kontribusi PBBKB terhadap PAD (Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Penerimaan PBBKB (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2014	163.479	563.108	29,03
2015	165.429	571.802	28,93
2016	151.587	574.911	26,37
2017	182.118	709.614	25,66
2018	265.482	849.906	31,24
<b>Rataan</b>	<b>185.619</b>	<b>653.868</b>	<b>28,25</b>

Sumber: Data hasil olahan (2019)

Berdasarkan tabel 13 di atas kontribusi PBBKB terhadap PAD sangat kecil dengan rata-rata kontribusi hanya 28,25% dari 100%. Sehingga PBBKB tidak memengaruhi PAD secara keseluruhan. Dilihat dari rata-rata PBBKB sebesar Rp 185.619.500.682,91 dan rata-rata PAD sebesar Rp 653.868.851.918,76, ini juga merupakan salah satu alasan PBBKB tidak berpengaruh terhadap PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun demikian terdapat kecenderungan bahwa setiap peningkatan pajak daerah yaitu PBBKB akan diikuti dengan kenaikan PAD jika dilihat dari nilai PBBKB yang positif dan searah.

**V. PENUTUP**

**Kesimpulan**

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Potensi pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif dari hasil analisis tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan bahwa setiap peningkatan pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor akan diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah jika dilihat dari nilai pajak kendaraan bermotor 3,142893 yang positif dan searah. Artinya, apabila pajak kendaraan bermotor meningkat Rp 1 maka pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan meningkat sebesar Rp 3,142893.
3. Bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun demikian, terdapat

kecenderungan bahwa setiap peningkatan pajak daerah yaitu bea balik nama kendaraan bermotor akan diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah jika dilihat dari nilai bea balik nama kendaraan bermotor 0,7176234 yang positif dan searah. Artinya apabila bea balik nama kendaraan bermotor meningkat Rp 1 maka pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan meningkat sebesar Rp 0,7176234.

4. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan bahwa setiap peningkatan pajak daerah yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor akan diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah jika dilihat dari nilai pajak bahan bakar kendaraan bermotor 0,7030886 yang positif dan searah. Artinya apabila pajak bahan bakar kendaraan bermotor meningkat Rp 1 maka pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan meningkat sebesar Rp 0,7030886.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran terhadap hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan pajak daerah yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Menjadikan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagai prioritas utama untuk dikembangkan potensinya.
3. Melakukan ekstensifikasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum terpungut harus dimaksimalisasi, agar potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang ada dapat semuanya dipungut oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Melakukan intensifikasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang sudah terpungut harus diintensifkan pemungutannya oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar potensi penerimaan yang sudah dipungut tersebut dapat ditingkatkan lagi.

**DAFTAR PUSTAKA**

1] Alhusain, Achmad Sani, Ariesty Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Lisnawati. 2018. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam*

- Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- 2] Heny Vitriana. 2008. "Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Potensi Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Bangka". Skripsi. Pangkalpinang: STIE IBEK
  - 3] Judiseno, Rimsy K. 2004. *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
  - 4] Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
  - 5] Melnia Gunawan. 2015. "Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan ROA Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka Studi Kasus PT. Bank Sinarmas, TBK". Skripsi. Pangkalpinang: STIE IBEK
  - 6] Mosal, Mourin M. 2013. *Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado*. Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi: 376
  - 7] Noor, Juliansyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah. Edisi 7*. Jakarta: Kencana
  - 8] Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2014-2018. *Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke KEMENDAGRI*. Pangkalpinang: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - 9] Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2017. *Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah*. Pangkalpinang: Sekretariat Daerah
  - 10] Pemerintah Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara
  - 11] Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara
  - 12] Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
  - 13] Sri Hapifah Pane. 2013. "Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Pajak Daerah Kota Pangkalpinang". Skripsi. Pangkalpinang: STIE IBEK
  - 14] Sukwiaty, Sudirman Jamal, Slamet Sukamto. 2009. *Ekonomi 2*. Jakarta: Yudhistira
  - 15] Tim Guru Indonesia. 2010. *Buku Pintar Pelajaran Ringkasan Materi Lengkap dan Kumpulan Rumus Lengkap*. Jakarta: PT Wahyu Media